

**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan  
oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam**

**pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**UIN Alauddin Makassar**

**ALA UDDIN**  
**M A K A S S A R**

Oleh:

**SITTI HARNI DJENI SAPUTRI D**

**NIM:10300111054**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITTI HARNI DJENI SAPUTRI D  
NIM : 10300111054  
Tempat/tgl. Lahir : Makassar/08 Januari 1994  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : BTN. Tamarunang Indah Blok H. 1 No. 20  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan ( studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar ).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Maret 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALA UDDIN**  
**SITTI HARNI DJENI SAPUTRI D**  
**NIM: 10300111054**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka pantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Dalhari dan Ibunda Misni Haerani, semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan.
3. Ibu Dra.Nila Sastrawati, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Alimuddin, S.Ag, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Darusalam, M.Ag, dan Dr. Hj. Rahmatia, HL, M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

6. Ibu Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mustari Muis, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kemudahan saat melakukan penelitian di instansi tersebut.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb*



Makassar, 05 Maret 2015

Penyusun,

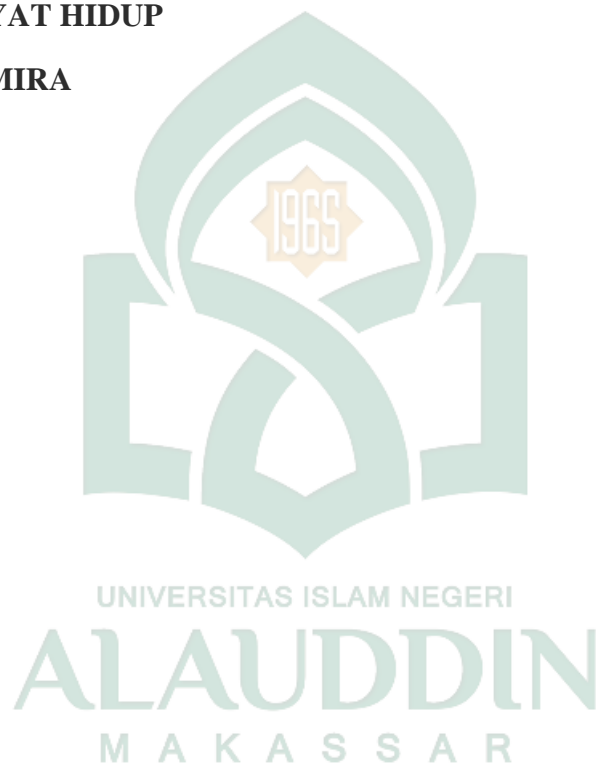
SITTI HARNI DJENI SAPUTRI D

NIM: 10300111054

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. ....	9
C. Rumusan masalah .....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana terhadap Bantuan Hukum yang Diberikan Advokat kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
B. Unsur-unsur Tindak pidana .....	28
C. Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan penelitian .....	34
C. Sumber data .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
G. Pengujian Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Mekanisme Tindak Pidana Pembunuhan yang Diberikan Bantuan Hukum oleh Advokat .....	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Kasus	

Tindak Pidana Pembunuhan yang Diberikan Bantuan Hukum oleh Advokat .....	53
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Implikasi Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMIRA</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostroferbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...   ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> <i>tau</i> ya	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> dan <i>w</i> <i>au</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

: *mata*

: *rama*

قِيل : *qila*

يَمُوت : *yamutu*

### 4. *Ta' marbutah*

*Transliterasi* untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

: *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: : *rabbana*

رَبَّنَا : *najjaina*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( *alif lam ma‘arifah* ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: : *ta'muru>na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *dinullah* *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

أَهِمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>

(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD = Undang-Undang Dasar

BADILUM = Badan Peradilan Umum

MA = Mahkamah Agung

LBH = Lembaga Bantuan Hukum

YLBHI = Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indones

HAM = Hak Asasi Manusia

SMS = Short Message Service

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam

QS.../....:.... = QS al- Baqarah’ / 2:178, QS at- Thin’/ 95:4, dan QS al- Baqarah’ / 2:179.

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

=

=

= صلى الله عليه وسلم

=

=

= الى اخرها

=



## **ABSTRAK**

Nama : Sitti Harni Djeni Saputri D  
Nim : 10300111054  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar )

---

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1. Bagaimana mekanisme tindak pidana pembunuhan yang diberikan bantuan hukum oleh advokat?, 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang diberikan bantuan hukum oleh advokat?, 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan?

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti ke Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap Advokat dan panitera.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat, didasarkan pada perspektif atas maraknya tindak pidana kejahatan terutama kasus pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. Adapun peranan advokat dalam mendampingi para pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan (tersangka).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan hakim memberikan putusan secara tegas dengan melihat berat ringannya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menuntut aturan lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan.<sup>1</sup>

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (Negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan atau merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif*

---

<sup>1</sup>Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, h. 331.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h. 6.

(pencegahan) dan *represif* (penindakan).<sup>3</sup> Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.

Sedangkan di dalam Islam hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>4</sup>

Pada tahun 1946 pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku yang berlaku pada tanggal 8 maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum pidana berlaku *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* yang belum diubah oleh tentara penduduk jepang.

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), h. 167.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 merupakan perubahan-perubahan dan tambahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie* yang kemudian dengan nama *Wetboek Van Strafrecht* diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 memberikan kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP yaitu ketentuan yang termuat dalam pasal V yang menegaskan bahwa:

*“Peraturan Hukum Pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sementara tidak berlaku.”*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 di atas berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1946 ditegaskan bahwa dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Selanjutnya, hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 dan merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda masih dinyatakan berlaku, maka seterusnya berlaku pula “Penetapan Raja” tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251

*Juncto* 486 tentang peraturan Cara Melakukan/Menjalankan Hukuman dengan syarat. Dalam Bab I Bagian II Pasal 3 Ayat 3 ditetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hokum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu.

Aturan ini berlaku pula sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi bagi Advokat dan *procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia, jika diterangkannya bahwa orang yang dihukum itu telah memberikan kuasa kepadanya untuk menyelidiki surat itu, dan sekadar tentang Majelis dan Badan Pengadilan lain-lain bagi orang yang istimewa dikuasakan untuk hal itu oleh orang yang dihukum.

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 4 ditetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang diwajibkan memberi bantuan didengar jika mereka hadir. Sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi maka orang yang dihukum itu boleh minta dibantu oleh seorang advokat dan atau *procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia dan sekadar tentang Majelis dan Badan Pengadilan lain-lain oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk itu sebagai penasihat.<sup>5</sup>

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhan pun berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam pasal 338 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara

---

<sup>5</sup> Dr. Frans Winarta Hendra,SH.,M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 18

paling lama lima belas tahun penjara”,<sup>6</sup> tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahului dengan perencanaan seperti dalam pasal 339 yang diancam dengan hukuman seumur hidup.

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitu : (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *kisas* dan *diat* yang tercantum didalam al-Qur'an dan hadis. Hal dimaksud adalah *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *takzir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan *jarimah takzir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.<sup>7</sup> Pembunuhan termasuk *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *kisas*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS al-Baqarah /2: 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِدَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 134.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 11.

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”<sup>8</sup>*

Pelaksanaan pidana mati dalam sejarah hukum pidana di Indonesia masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati sering digantikan dengan hukuman penjara. Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.<sup>9</sup> Dengan adanya bantuan hukum diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin, dan diberi kesempatan membela diri dengan didampingi penasihat hukum. Sering kali tersangka atau terdakwa diabaikan hak-haknya dan diperlakukan tidak adil, bahkan disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Bantuan hukum diharapkan dapat melindungi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin dan tidak dapat memperoleh jasa pembelaan advokat yang provisional. Sering juga tersangka atau terdakwa tidak diberi tahu alasan diperiksa polisi atau jaksa, tidak tahu tuduhan tindak pidana apa yang dialamatkan kepada terdakwa. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan. Ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil. Hakim berat sebelah dan menghukum atau menjatuhkan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h. 43.

<sup>9</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV, Mandar Maju, 1997), h. 188.

putusan tanpa alasan-alasan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang pada akhirnya merupakan pengabaian atas hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup> Sedangkan bantuan hukum menurut Pasal 22 UU RI NO.18 Tahun 2003 adalah (1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>11</sup> Demikian pula implementasi bantuan hukum di Indonesia. Di Negara ini terjadi distorsi konsep bantuan hukum. Terdapat banyak sekali organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum namun mengenakan fee (tarif) kepada kliennya bahkan kepada fakir miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik minat untuk mengetahui bagaimana bantuan hukum itu diberikan mengingat hanya tersangka yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum apalagi seperti kasus pembunuhan. Selain itu, merasa menarik untuk mengetahui bantuan hukum itu ditinjau dari sudut pandang atau perspektif hukum pidana, kemudian mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Biberikan Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).

---

<sup>10</sup> Dr. Frans Winarta Hendra, SH., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, h. 49.

<sup>11</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, h. 324.



## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **a. Deskripsi fokus penelitian**

Dari latar belakang diatas pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah yang digunakan yaitu:

1. Hukum pidana: a. Hukum yaitu aturan;
  - b. Pidana yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) perlu ditingkatkan pemberantasan.<sup>12</sup>
  - c. Hukum pidana yaitu hokum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>13</sup>
2. Bantuan hukum yaitu: (1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
  - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>14</sup>
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1138.

<sup>13</sup>Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 170.

<sup>14</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, h. 324.

<sup>15</sup>Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, h. 316.

4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>
5. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>
6. Pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhayli yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”, selain itu Abdul Qadir al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja,<sup>19</sup> pengertian *jarimah* pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang meninggal

---

<sup>16</sup>Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, h. 7.

<sup>17</sup>Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h. 311.

<sup>18</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 177.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.

dunia.<sup>20</sup> Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itu merupakan aktifitas menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum.

#### **b. Fokus penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar. Judul skripsi ini, meninjau sejauh mana peran advokat sebagai sarana pembantu keadilan dalam menjalankan tugasnya, dan penetapan Pengadilan Negeri Makassar dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan kemudian faktor-faktor apa yang membuat seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam mengungkap dan menetapkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang didampingi advokat (penasihat hukum) secara Cuma-Cuma atau memberikan bantuan hukum. Apakah dalam melaksanakan tugasnya telah mencapai tujuan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan analisa latar belakang yang telah dipaparkan, maka merumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian dan penulisan skripsi, maka penulis merumuskan ke dalam sub-sub point masalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

1. Bagaimana mekanisme tindak pidana pembunuhan yang diberikan bantuan hukum oleh advokat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang diberikan bantuan hukum oleh advokat?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Andi Hamzah, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)* yang menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, serta proses beracara dalam hukum pidana. Buku ini menjelaskan tentang hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHAP sehingga sangat membantu dalam menguraikan proses demi proses dalam alur pembuktian hukum acara pidana.
2. Moeljatno, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, karyanya ini membahas tentang apa hukum pidana itu, asas-asas hukum pidana, ilmu hukum pidana, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana sampai dengan pertanggung jawaban hukum pidana. Namun sebelum itu sedikit saya jelaskan tentang hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*. Karyanya ini menjelaskan hukum pidana islam, asas-asas, sumber-sumber sampai dengan konsep hukum pidana islam. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>21</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>21</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

4. Buku yang disusun oleh TIM “Permata Press” yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Buku ini menjelaskan tentang UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan, UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut saya buku ini sangat membantu dalam penyusunan skripsi karena pembahasan Undang-Undang disertai dengan penjelasannya.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan**

##### **a. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian kasus hukum pidana terhadap bantuan hukum yang diberikan advokat kepada tersangka tindak pidana pembunuhan.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus pembunuhan.

##### **b. Kegunaan**

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini di harapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan di dalam

penulisan bidang ilmu hukum pidana khususnya penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan kemudian kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ada bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang khusus diberikan advokat.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang peranan Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan dan mengungkap tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan bantuan hukum dari advokat, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, serta hambatan-hambatan yang ditemui Pengadilan Negeri Makassar dalam mengungkap dan menetapkan putusan.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana pembunuhan

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan***

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa dan hakim, yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah social yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau mahkama konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitutio*, maka hokum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.



Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga Negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.<sup>1</sup>

Hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma.<sup>2</sup> Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sedemikian jahatnya, dan pelanggaran atas norma-norma tadi disebut kejahatan.

Karena itu, tidaklah berlebihan jika istilah hukum pidana yang kita maksud dan dikenal dalam pembendaharaan Bahasa Indonesia adalah hukum tentang kejahatan. Di Malaysia, istilah yang sama untuk menyebut hukum pidana adalah *hukum jinayah* yang diambil dari bahasa Arab dan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *criminal law*. Dalam Bahasa

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.1

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.1

Indonesia tidak dikenal istilah hukum kejahatan, tetapi digunakan istilah hukum pidana.

**Simons** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gedbod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. **Moeljatno** menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya, pengertian hukum pidana berikut ini menurut pendapat para ahli lain:<sup>3</sup>

1. **Wirjono Prodjodikoro**, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

---

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 6

2. **WFC. Hattum**, hokum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hokum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hokum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hokum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.
3. **WLG. Lemaire**, hokum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dalam bukunya yang terkenal *The Limits of Criminal Sanction*, **Herbert L. Packer**<sup>4</sup> menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman.

Sejalan dengan pendapat **Packer** di atas, **Sudarto** menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu dan tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h.11

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), h.150

Tentang orang yang melanggar larangan itu, sering juga disebut dalam literature hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggung jawaban pidana. **Hanafi** misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hokum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. **Andi Zainul Abidin** adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;

---

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h.12

c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh **Van Hatum** bahwa sesungguhnya harus sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person starbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>7</sup>

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatannya yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Sedangkan pengertiannya, menurut **Simons** tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

a. Menurut **Pompe** “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai sesuatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

---

<sup>7</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 96

dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharahnya tertib hokum dan terjaminnya kepentingan hokum.<sup>8</sup>

- b. **Van Hamel** merumuskan *strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>9</sup>
- c. Menurut **E. Utrecht** “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>10</sup>

Sementara itu **Moeljatno** menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut **Moeljatno** dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.182

<sup>9</sup> Lamintang, *Dasar-Daar Hukum Pidana Indonesia*, h.184

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>11</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, *Hukum pidana Indonesia*, h. 98

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 3

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hokum pidana. Karena isi hokum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hokum pidana, biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang lain tidak masuk, dan berada diluarnya.

### 3. Pengertian Bantuan Hukum

Masalah bantuan hukum dalam kaitannya dengan aspek terhadap keadilan merupakan hal yang tidak mudah untuk diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum saja melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Permasalahan tersebut semakin bertambah sulit dengan timbulnya dampak social dibidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya sebagai akibat dari adanya proses pembangunan, seperti semakin luasnya tingkat kemiskinan, semakin tingginya tingkat buta huruf, dan keadaan kesehatan masyarakat yang semakin buruk.



Bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa romawi, pemberian untuk mendapatkannya bantuan hukum oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan dimana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang.<sup>13</sup>

Sejak terjadi Revolusi Prancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada (*charity*) terhadap masyarakat yang tidak mampu tapi kerap dihubungkan dengan hak-hak politik. Dalam perkembangan hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita Negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana pemerintah memunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya,<sup>14</sup> bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan social dipergunakan guna menetralisasi ketidak pastian dan kemiskinan. Karena itu perkembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.

---

<sup>13</sup> Daniel S Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (USAID: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h. 157

<sup>14</sup> Daniel S Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, h.157

Peran Negara yang (*intensif*) diperlukan dalam merealisasikannya karena Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya hingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh Negara melalui pemberi bantuan hukum kepada warganya.<sup>15</sup>

Sementara itu Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam 2 macam, yaitu hukum Individual dan hukum Struktural.

1. Bantuan Hukum Individual merupakan pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan, oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang di hadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti *Arbitrase*, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Bantuan Hukum Struktural segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditunjukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih

---

<sup>15</sup> Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, h. 158

luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.<sup>16</sup>

Dalam literature bahasa inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hokum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

#### 4. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal-hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>17</sup> Pembunuhan secara terminology adalah perkara membunuh; perbuatan (hal,dsb) membunuh.<sup>18</sup> Sedangkan dalam istilah KUHP

<sup>16</sup> Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, h. 159

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni 1992), h.129.

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet.5* (Jakarta: Balai Pustaka,1982), h.169.

pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>19</sup> Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil yang artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>20</sup> Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- a. Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukan.
- b. Dengan sengaja : dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu :
  - 1) Sengaja sebagai maksud.
  - 2) Sengaja dengan keinsafan.
  - 3) Menghilangkan nyawa orang lain.<sup>21</sup>

#### **B. Unsur-unsur tindak pidana**

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

##### **1. Unsur-unsur pidana**

<sup>19</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h.122.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Grafika, 2007), h. 22.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walupun melawan hukum kadang-kadang dicantumkan adalah mengenai unsur kemampun bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

---

<sup>22</sup> Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batasan berlakunya Hukum Pidana*, h. 79.

Abdul Qodir 'Audah mengemukakan, bahwa unsur-unsur umum tindak pidana ada tiga, yaitu:

1. Unsur formil yaitu adanya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman,
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif),
3. Unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang diperbuat.<sup>23</sup>

### ***C. Cara Mendapatkan Bantuan Hukum bagi Masyarakat***

Sebagian besar LBH, yang berjumlah sekitar 300 organisasi di Indonesia, bekerja dan berkonsentrasi di kota-kota besar dan tidak beroperasi sampai ke desa-desa. Banyak pendapat ahli hukum yang mendorong agar bantuan hukum dapat mencapai ke desa-desa karena menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, sekitar 19,93 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan sisanya di daerah perkotaan. Dari sumber yang sama disebutkan pula bahwa persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)  
h. 27

pedesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2009, 63% penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64%.

Dari data tersebut boleh dikatakan basis ekonomi Indonesia adalah pertanian. Ini berarti bantuan hukum structural yang diprakarsai dan diperkenalkan YLBHI sesuai dengan kebutuhan rakyat pedesaan yang miskin dan rata-rata masih buta bantuan hukum dan tidak tau hak-haknya, termasuk hak politik, hak ekonomi, dan hak asasi manusia. Apalagi laporan bappenas membuktikan presentase desa miskin dan tertinggal di tanah air masih cukup tinggi.

Upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan social dapat dicapai melalui alternatif gerakan bantuan hukum bagi fakir miskin, yang diperkirakan sudah turun sampai tinggal sekitar 30% pada tahun 1990-an. Kemudian jumlah itu naik lagi secara drastic semenjak krisis moneter Juli 1997 yang diikuti krisis bidang politik dan di bidang lainnya hingga diperkirakan oleh para ahli ekonomi akan mencapai 100 juta orang (kurang lebih 50%) pada akhir tahun 1998.

Dari laporan organisasi hak asasi manusia, baik local maupun Internasional seperti Komnas HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Watch (Asia Watch), International Commission of Jurists (ICJ), dan lain-lain banyak terjadi penyiksaan, perlakuan dan hubungan yang tidak adil, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini dapat terjadi di Indonesia karena tidak adanya

jaminan *due process of law*, seperti pendampingan pembelaan oleh advokat serta jaminan dan rasa hormat para penegak hukum dalam system peradilan pidana dan Criminal policy atas hak hidup, hak milik dan kemerdekaan.<sup>24</sup>

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara menuntaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dan bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi gerakan gejolak sosial dan keresahan sosial, juga akan mendorong pencapaian Negara hukum yang dicita-citakan.

Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dibatasi hak asasi manusia sehingga Negara tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Semua orang yang ditangkap dan ditahan harus diperlakukan adil dan manusiawi. Kalau tidak bersalah segera dibebaskan, dan kalau bersalah diproses ke pengadilan. Polisi dan jaksa harus mengembangkan sikap *presumption of innocence*. Diadili oleh pengadilan yang terbuka, jujur, dan *fair*. Orang hanya boleh dibatasi dan dirampas kemerdekaannya melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Begitu pula

---

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), h. 119-122.



nyawa manusia baru boleh diambil melalui putusan pengadilan yang sudah final. Ihwal hukuman mati ini masih diperdebatkan ahli hukum dan kriminologi serta masih menjadi pro dan kontra. Akan tetapi, proses hukum yang adil mutlak harus dijamin dalam Negara hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 disebutkan cara penyelenggaraan bantuan hukum perkara pidana:

1. Melengkapi surat kuasa khusus,
2. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat,
3. Pemohon memberikan semua dokumen pendukung untuk menetapkan dan penunjukan advokat,
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan kuasa pengguna anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada advokat,
5. Proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri,
6. Perkara diputus,
7. Pencairan anggaran bantuan hukum kepada Advokat,
8. Pengadilan Negeri menyampaikan laporan kepada Dirjen Badilum melalui situs web MA atau mengirim SMS ke SMS centre.

---

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan hokum di Indonesia*, h. 124.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis di sini adalah Pengadilan Negeri Makassar.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif (hukum positif) dan teologi normatif (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. *Data primer* merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk

memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kuantitatif.

- b. *Data sekunder* merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut :

1). Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

2). Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>1</sup>
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>2</sup>
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>3</sup>

#### **b. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut : kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat tersebut di teruskan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada bagian Balitbangda, lalu diteruskan ke

---

<sup>1</sup>Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Data Media, 1994), h. 46.

<sup>2</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h.172.

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

kantor Walikota Makassar sesuai lokasi mendapatkan surat izin penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “*devalidasi*” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya berjuang kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah :

1. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

#### **b. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat

memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik penguji kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, dan triangulasi dengan teori.<sup>4</sup> Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.



---

<sup>4</sup>Junaidi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 322

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambar Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Letak Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Kota Makassar terletak di jalan Kartini No. 18/23 kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri sangat strategis tepatnya berada ditengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota makassar menjangkau pengadilan tersebut.

Adapun batas-batas letak Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan monumen mandala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan karebosi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sakit plamonia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Bank mandiri cabang Makassar.

Letak Pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh dari perkotaan pemerintah lainnya, seperti Kantor Wali Kota Makassar, Kantor Polrestabes Makassar, Kantor BI Cabang Makassar, Menara Bosowa, dan pusat perbelanjaan, seperti Karebosi link, Makassar Trade Center (MTC), dan pasar sentral Makassar.



## 2. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Negeri Makassar memiliki gedung yang memadai. Segala keperluan penyelenggaraan sidang perkara pidana dan perkara perdata. Ruang sidang perkara Pengadilan Negeri Makassar terdiri dari tiga ruang sidang. Selain itu, tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural, seperti ruang ketua Pengadilan Negeri Makassar dan wakilnya, ruang ketua panitera-panitera pengganti, ruang bendahara, dan ruang bagi pegawai pengadilan lainnya. Di samping itu, terdapat ruang tenaga teknis, seperti ruang para hakim yang bertugas rutin memeriksa perkara. Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar telah dibentuk di dalamnya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tipikor.

## 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata. Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya.<sup>1</sup> Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan

---

<sup>1</sup> Muhammad Damis, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*, Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 January 2015.

memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat.

**B. *Mekanisme Tindak Pidana Pembunuhan yang diberikan Bantuan Hukum oleh Advokat***

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/ atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja, tidak disengaja dan semi sengaja.

Mekanisme atau cara melakukan pembunuhan dimaksud, menurut penasihat hukum yaitu :

**1. Pembunuhan Sengaja**

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

**2. Pembunuhan Tidak Disengaja**

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

### 3. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.<sup>2</sup>

Adapun mekanisme yang dilakukan advokat dalam persidangan membela terdakwa yaitu :

Pada saat berita acara sidang Pertama **No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks**

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara Pidana menurut Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan R.A Kartini No. 23 Makassar**, pada hari **Selasa** tanggal **08 April 2014**. Dalam perkara para terdakwa :

**IRWAN IDRIS ALIAS IWAN LILI**

**Susunan Persidangan :**

- SUPARMAN NYOMPA , SH.MH .....Hakim Ketua
- H. SUNARSO , SH.MH .....Hakim Anggota
- ACICE SENDONG , SH. MH .....Hakim Anggota

---

<sup>2</sup> Titi S.Slamet, Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar , 20 January 2015.

- ALID BURHAN , SH .....Panitera Pengganti
- GREAFIK LOSERTE , TK SH .....Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan.

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dan juga tidak menghadapkan terdakwa dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang maka sidang tidak dapat dilanjutkan.

Berhubung hal tersebut Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan kembali sidang yang akan datang pada hari **Selasa, tanggal 15 April 2014, jam 09.00 wita** untuk menghadapkan terdakwa dipersidangan pada hari yang telah ditetapkan diatas,

Setelah itu sidang ditutup,

Pada saat berita acara siding kedua **No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan R.A Kartini No. 23 Makassar**, pada hari **Selasa tanggal 15 April 2014**. Dalam perkara para terdakwa :

**IRWAN IDRIS ALIAS IWAN LILI**

Susunan persidangan :

- SUPARMAN NYOMPA , SH.MH .....Hakim Ketua
- H. SUNARSO , SH.MH .....Hakim Anggota
- ACICE SENDONG , SH. MH .....Hakim Anggota
- ALID BURHAN , SH .....Panitera Pengganti
- GREAFIK LOSERTE , TK SH .....Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang ketat, lalu Terdakwa tersebut dipersilahkan duduk dikursi pemeriksaan dan atas pernyataan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan dilanjutkan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Selanjutnya atas pernyataan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia ingin didampingi Penasihat Hukum akan tetapi tidak mampu untuk membayar jasa Pengacara.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sedang perkara Terdakwa ancaman hukuman 15 tahun,

untuk itu siding ditunda untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim menunjuk Penahat Hukum yang akan mendampingi terdakwa dipersidangan.

Berhubung hal tersebut Hakim Ketua menunda siding dan menetapkan kembali siding yang akan datang pada hari **Selasa, tanggal 22 April 2014, jam 09.00 wita** untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa dipersidangan pada hari yang telah ditetapkan diatas.

Setelah itu sidang ditutup.

Pada saat berita acara siding ketiga **No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan R.A Kartini No. 23 Makassar,** pada hari **Selasa tanggal 22 April 2014.** Dalam perkara para terdakwa :

**IRWAN IDRIS ALIAS IWAN LILI**

Susunan persidangan :

- SUPARMAN NYOMPA , SH.MH .....Hakim Ketua
- H. SUNARSO , SH.MH .....Hakim Anggota
- ACICE SENDONG , SH. MH .....Hakim Anggota
- ALID BURHAN , SH .....Panitera Pengganti

- GREAFIK LOSERTE , TK SH .....Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang ketat, lalu Terdakwa tersebut dipersilahkan duduk dikursi pemeriksaan dan atas pernyataan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan dilanjutkan.

Selanjutnya Hakim Ketua memeriksa identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **IRWAN IDRIS ALS. IWAN LILI**

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur /tgl. Lahir : 22 tahun / 20 April 1991

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sapiria Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tahanan Rutan Makassar sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
3. Penuntut Umum di Rutan Makassar sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tahanan Rutan Makassar sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014.

Selanjutnya hakim ketua membacakan penetapan tertanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma yang akan mendampingi terdakwa selama dalam persidangan yaitu : **DR. TITI S. SLAMET, SH.MH., AISYAH H. IBRAHIM SH., HERDIA, SH., MULIANA, SH., SAHRASIA, SH.** Tim Advokat/ Penasihat Hukum pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar.

Selanjutnya Hakim Ketua meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Dakwaannya yang tertanggal 24 Maret 2014 No.REG.PERK. : PDM-189/MKS/Ep/3/2014 ;



Selanjutnya atas pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Selanjutnya atas pernyataan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum belum memanggil saksi-saksi dan mohon diberi waktu untuk memanggil saksi-saksi tersebut guna didengar keterangannya pada persidangan yang datang,

Berhubungan hal tersebut Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan kembali sidang yang akan datang pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014, jam 09.00 wita** untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-rangan diperidanga yang telah ditetapkan diatas.

Setelah itu sidang ditutup.

Pada saat berita acara sidang keempat **No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan R.A Kartini No. 23 Makassar,** pada hari **Rabu tanggal 30 April 2014.** Dalam perkara para terdakwa :

**IRWAN IDRIS ALIAS IWAN LILI**

Susunan persidangan :

- SUPARMAN NYOMPA , SH.MH .....Hakim Ketua
- H. SUNARSO , SH.MH .....Hakim Anggota
- ACICE SENDONG , SH. MH .....Hakim Anggota
- ALID BURHAN , SH .....Panitera Pengganti
- GREAFIK LOSERTE , TK SH .....Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan didampingi penasidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang ketat, lalu Terdakwa tersebut dipersilahkan duduk dikursi pemeriksaan dan atas pernyataan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan dilanjutkan.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara persidangan hari ini sebagaimana penundaan sidang yang lalu adalah Pemeriksaan saksi

Selanjutnya atas pernyataan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa 3 (tiga) orang saksi hadir dan siap memberikan keterangan sehubungan dengan kasus terdakwa diatas.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini saksinya sudah cukup, dan masih akan mengajukan saksi pada persidangan yang akan datang mohon diberi waktu.

Berhubung hal tersebut Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan kembali sidang yang akan datang pada hari **Rabu, tanggal 07 Mei 2014, jam 09.00 wita** untuk member kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangan dipersidangan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas.

Setelah itu sidang ditutup.

Pada saat berita acara siding kelima **No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan R.A Kartini No. 23 Makassar, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014.** Dalam perkara para terdakwa :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa : **IRWAN IDRIS alias IWAN LILI** identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah badik coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami : **SUPARMAN NYOMPA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACICE SONDANG, S.H.,M.H., H. SUNARSO, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALID BURHAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dihadiri **GREAFIK LOSERTE T.K, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Alid Burhan, Panitera Pengganti, *Petikan Putusan Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan*, di Pengadilan Negeri Makassar.

***C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang diberikan Bantuan hukum oleh Advokat***

Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan yaitu tergantung dari tindak pidana, artinya jika tindak pidana pembunuhan maka berdasarkan undang-undang tindak pidana pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP, pasal-pasal dari undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Intinya apapun tindak pidananya harus disesuaikan tindak pidana itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada dua kasus yang identik sama sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus.

Tugas hakim hanya terbatas hingga menjalankan undang-undang dan berasal dari teori-teori hukuman dan kriminalitas yang meletakkan titik berat pada daya yang timbul dari ancaman hukuman.

Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang tidak tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Dakwaan Kesatu, hal ini sependapat dengan Penuntut Umum untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 338 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

---

<sup>4</sup>.Acice Sendong, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*, Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 Januari 2015.

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

- 1) Unsur: **Barang Siapa** adalah menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Irwan Idris alias Iwan Lili, hal mana dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang sehat akal pikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi ;
- 2) Unsur: **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (Risalah penjelasan undang-undang), sengaja (dolus) berarti menghendaki, mengetahui, membuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Selanjutnya sengaja ada 3 tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rusli Effendy, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, (1989 :81) yaitu :

1. Sengaja sebagai niat, akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
2. Sengaja kesadaran akan kepastian, yaitu ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan menjadi akibat tertentu dari perbuatan tersebut .

3. Sengaja insaf kemungkinan, yaitu dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan tersebut.<sup>5</sup>

#### **D. *Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana pembunuhan***

Hukum pidana islam merupakan salah satu bagian dari syari'at islam yang berdasarkan al-qur'an dan hadist atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukuman. Dalam hukum ini terdapat beberapa anggapan, diantaranya adanya anggapan yang mengatakan hukum ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern dikarenakan hukuman ini dianggap hanya berlaku pada zaman Rasul, anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientalis barat pada umumnya, yang mengatakan hukum pidana islam itu hukum yang kejam, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Kalau kita teliti seksama, tidak ada satupun hukum pidana didunia ini yang tidak merampas hak asasi manusia. Dalam konflik inilah, penulis mengungkapkan macam-macam hukum pidana islam tersebut seperti gabungan hukum yang mana hukuman itu terlihat sangat berat karena terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang secara berturut-turut sebelum adanya keputusan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama, sehingga menimbulkan perbedaan hukuman antara sebelum adanya keputusan.

---

<sup>5</sup> Alid Burhan, Panitera Pengganti, *Petikan Putusan Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan*, di Pengadilan Negeri Makassar.

Manusia adalah makhluk (ciptaan) Tuhan yang paling sempurna, disbanding makhluk lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS Al- Thin/ 95:4

تَقْوِيمٍ أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَنِ خَلَقْنَا لَقَدْ

*Terjemahannya :*

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya<sup>6</sup>*

Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang. Membunuh orang termasuk salah satu perbuatan yang berdosa besar selain syirik (menyekutukan Allah). Maka karena keji dan terkutuknya perbuatan ini dan guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Islam memberikan sanksi (ancaman) hukum yang jelas. Demikian juga hukum positif dalam KUHP memberikan sanksi-sanksi hukum baik berupa hukum penjara atau hukuman lainnya.<sup>7</sup>

Orang yang membunuh wajib diqishash menurut kadar bagaimana ia membunuhnya. Qishash di sini dimaksudkan sebagai hukuman yang bernilai represif bagi yang tidak ingin melakukan pembunuhan. Dan bernilai kenatif bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan. Pembunuhan dipandang dari segi apapun jelas tidak bisa ditolerir, jadi adanya balasan qishash hanya semata-mata merupakan jalan keluar agar manusia tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Firman Allah dalam QS Al- Baqarah/ 2:179

<sup>6</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1076.

<sup>7</sup> Abdul Rahman, *fiqih* (Bandung, CV Armico, 1988), h. 166.



وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي آلَ الْبَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*Terjemahannya:*

*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*<sup>8</sup>

Adapun, syarat bagi pelaksanaan hukuman qishash adalah sebagai berikut :

1. Si pembunuh telah baligh dan berakal sehat (cakap melakukan perbuatan hukum).
2. Si pembunuh bukan orang tua (bapak) dari si terbunuh.
3. Si pembunuh tidak lebih rendah derajatnya daripada si pembunuh.  
Misalnya orang Islam membunuh orang kafir tidak wajib diqishash.
4. Yang terbunuh adalah terpelihara darahnya, karena Islam atau perjanjian.<sup>9</sup>

Diyat (denda) ialah membayar sejumlah uang atau barang sebagai pengganti hukum jiwa (atau anggota badan yang tidak berlaku atau tidak diberlakukan hukum bunuh, karena keluarga si terbunuh memaafkannya).

Diyat ada dua macam yaitu :

1. Diyat berat adalah 100 ekor unta, terdiri dari 30 unta hiqqah (betina umur 3-4 tahun), 30 unta jadza'ah (betina 4-5 tahun), dan 40 unta khalifa (bunting). Dalam pembunuhan sengaja denda ini harus dibayar

<sup>8</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

<sup>9</sup> Abdul Rahman, *fiqih*, h. 170

secara kontan. Jika pembunuhan mirip sengaja (syibhul amdi) maka dapat diangsur 3 kali (setiap tahun dibayar  $\frac{1}{3}$  ).

2. Diyat ringan adalah 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina 2-3 tahun, 20 ekor jantan 2-3 tahun, 20 ekor unta 3-4 tahun dan 20 ekor unta betina 4-5 tahun. Denda ini dibayar dalam tempo 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika misalnya tidak ditemukan sejumlah tersebut, dapat dibayar dengan jumlah uang senilai 100 unta diatas.

Dipandang dari segi jenis kelamin, maka apabila terjadi pembunuhan terhadap orang perempuan maka jika diambil denda adalah separuh dari denda untuk laki-laki.<sup>10</sup>

Kafarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat islam karena salah atau dianggap salah melanggar hal-hal yang diharamkan, misalnya kafarat karena membunuh seseorang dengan memerdekakan budak yang beriman dan tidak cacat. Jika tidak ditemukan maka kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut.<sup>11</sup>

Orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki banyak macam alasan yang melatarbelakangi mengapa dia melakukan perbuatan seperti itu, kebanyakan yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang akhlaknya

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman, *fiqih*, h.173

<sup>11</sup> Abdul Rahman, *fikih*, h. 176

kurang baik. Ada juga yang mengatakan pendidikan sangatlah penting untuk bekal seseorang untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik seperti membunuh dan dengan pendidikan kita belajar akan etika dan moral dalam bermasyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Ksimpulan*

1. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/ atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja, tidak disengaja dan semi sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh, Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan pennebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia, Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

2. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan yaitu tergantung dari tindak pidana, artinya jika tindak pidana pembunuhan maka berdasarkan undang-undang tindak pidana pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP , pasal-pasal dari undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Intinya apapun

tindak pidananya harus disesuaikan tindak pidana itu sendiri, Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang tidak tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.

3. Hukum pidana islam merupakan salah satu bagian dari syari'at islam yang berdasarkan al-qur'an dan hadist atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukuman. Dalam hukum ini terdapat beberapa anggapan, diantaranya adanya anggapan yang mengatakan hukum ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern dikarenakan hukuman ini dianggap hanya berlaku pada zaman Rasul, anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientalis barat pada umumnya, yang mengatakan hukum pidana islam itu hukum yang kejam, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Kalau kita teliti seksama, tidak ada satupun hukum pidana didunia ini yang tidak merampas hak asasi manusia. Dalam konflik inilah, penulis mengungkapkan macam-macam hukum pidana islam tersebut seperti gabungan hukum yang mana hukuman itu terlihat sangat berat karena terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang secara berturut-turut sebelum adanya keputusan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama, sehingga menimbulkan perbedaan hukuman antara sebelum adanya keputusan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Banyaknya kasus pembunuhan dizaman modern sekarang ini sebetulnya dikarenakan oleh banyaknya pengaruh-pengaruh buruk dalam pergaulan, kemudian rendahnya standar pendidikan yang mereka tempuh, menyebabkan etika atau moral mereka kurang baik dan gampangnya terhasut dan susah mengontrol emosi mereka dan melakukan hal-hal yang merugikan seperti membunuh.

Adapun peranan advokat dalam mendampingi para pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan (tersangka). Hakim harusnya bisa secara tegas menetapkan hukuman kepada setiap pelaku pembunuhan, agar semua masyarakat merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Pendidikan dan penanaman moral yang baik juga harus diterapkan sejak dini agar membentuk pribadi yang baik kedepannya dan tidak banyak lagi kasus pembunuhan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Daniel S Lev, *Advolat Indonesia Mencari Legitimasi*. USAID: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hendra, Frans Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex, 2011.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni 1992.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.

Marbun, Rocky. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media, 2012.

Muhlich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Kitab Undang -Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2011

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Grafika, 2007.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Permata Press. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

P.A.F, Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rosyanda, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Rahman, Abdul. *fiqih*. Bandung, CV Armico, 1988.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2007.



- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Data Media, 1994.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet.5*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.

